Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan

https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP

Vol. 8, No.7, Mei 2022

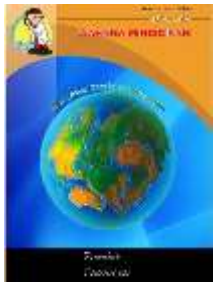

Collaborative Governance dalam Pengelolaan Wisata Alam Green Canyon di Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang

Wida Lestari[1], Eka Yulyana[2], Lina Aryani[3]

[1]Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang
[2,3]Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Singaperbangsa Karawang
Email: **Widalee249@gmail.com** , HP. +62895-3699-3617

Info Artikel
Sejarah Artikel:
Diterima: 1 Mei 2022
Direvisi: 7 Mei 2022
Dipublikasikan: Mei 2022
e-ISSN: 2089-5364
p-ISSN: 2622-8327
DOI: 10.5281/zenodo.6557133

Abstract:
This study aims to determine and analyze collaborative governance in the management of Green Canyon Nature Tourism in Medalsari Village, Pangkalan District, Karawang Regency. In analyzing the author uses Ansel and Gash's collaborative governance theory which has four variable dimensions including initial conditions, institutional design, facilitative leadership and collaboration processes. This research is a descriptive qualitative type with data collection taken through the triangulation technique of interview, observation and documentation and then analyzed through three stages, namely reduction, presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that collaboration in the management of Green Canyon Nature tourism does not run optimally because of the lack of participation and knowledge of the actors involved, both public and private, and the government's role in initiating collaboration with the public and private sector is not visible.

Keywords: *Collaborative, Green Canyon, tourist*

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor yang cukup strategis guna memperkuat serta meingkatkan perekonomian baik secara dalam ruang lingkup lokal, nasional maupun global. Dimana menurut *United Nations World Tourism Organization* dalam (Sabon, 2018) menyatakan bahwa sektor pariwisata telah menjadi penyumbang tertinggi GDP Dunia dibandingkan dengan sektor-sektor lain, selain itu industri pariwisata juga dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan yang mampu menyerap banyak tenaga kerja terhitung jumlah pekerja di seluruh dunia 11 persennya bekerja pada sektor industri pariwisata.

Indonesia iaah negara yang sangat kaya akan potensi wisata, tercatat berdasarkan data dari Global Economic Monitor World Trend Plus yang dirisilis dalam (CEIC Data, 2021) pendapatan

Indonesia melalui sektor pariwisata pada masa sebelum pandemi selalu menampilkan grafik yang terus meningkat, semisal pada tahun 2015 yang menyentuh angka 12 juta USD, kemudian pada tahun berikutya melonjak menjadi 12.5 Juta USD, lalu ditahun 2017 terdapat kenaikan 2 juta USD, 2018 naik lagi menjadi 17.9 juta USD dan ditahun 2019 mencapai 18.4 Juta USD namun mengalami penurunan akibat adanya pembatasan berskala nasional pada tahun 2020 sehingga pendapatan dari pariwisata hanya mendapatkan 3.5 Juta USD. Berikut penulis sajikan grafik statistika pendapatan dari sektor industri pariwisata dalam hitungan Jutaan USD pada kurun waktu 2011-2020

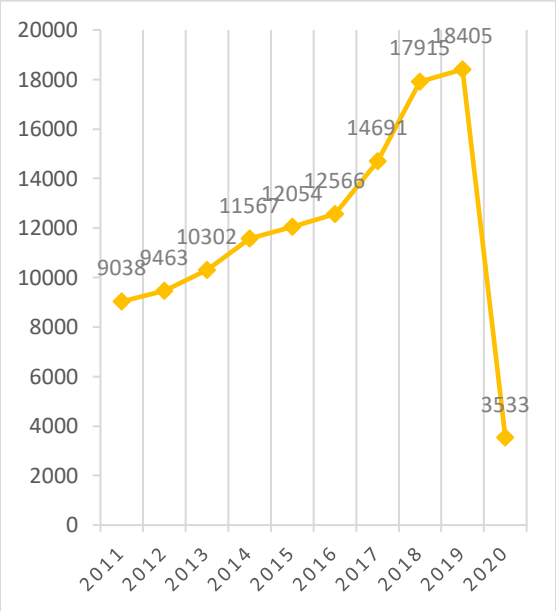

Grafik 1 Jumlah Pendapatan Indonesia dari Sektor Wisata 2011-2021 (Hitungan Jutaan USD)

Sumber: CEIC Data, 2021

Berdasarkan grafik statistika yang telah disebutkan diatas, maka dapat kita lihat jika sektor industri pariwisata memiliki sumbangasih besar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, dimana dalam kurun waktu 2011-2020 Indonesia telah mendapatkan setidaknya puluhan juta USD. Meskipun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan namun sektor pariwisata masih sangat diharapkan untuk membantu pemulihan ekonomi Indonesia terutama pasca wabah pandemi Covid-19.

Hal ini selaras dengan pernyataan dari Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dalam buku Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020/2021 (2021, hal. 6) yang menyatakan bahwa sektor pariwisata masih menjadi salahsatu tumpuan utama untuk memulihkan ekonomi, sosial dan budaya Indonesia yang telah terdekontruksi akibat adanya wabah pandemi Covid-19, sehingga Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia pada tahun 2022 telah memberikan target besar yakni kenaikan sebesar 1,4 persen jumlah pendapatan dari sektor industri pariwisata maka Pengembangan sektor pariwisata mendapat perhatian cukup besar dari Pemerintah Pusat.

Pada hakikatnya setiap wilayah Indonesia dapat menyuguhkan kekayaan destinasi wisata yang indah dan unik (Harefa, 2020). Akan tetapi menurut Andi Mappi Sameng (2013) suatu daerah atau wilayah akan menjadi lebih menarik jika daerah tersebut memiliki prioritas dalam pembangunan destinasi pariwisata yang berbeda, seperti corak wisata yang menarik didaerah perdeasaan adalah corak wisata buatan bukan alam begitupun sebaliknya hal ini dikarenakan psikologi seseorang dari Kota dalam menentukan minat wisatawan akan cenderung pada pemilian lokasi wisata yang mampu memberikan ketenangan dan keasrian karena penatnya rutinitas pekerjaan juga bosannya mereka melihat bangunan-bangunan.

Kabupaten Karawang adalah salahsatu daerah di Indonesia yang memiliki City Branding sebagai kota Industri karena banyaknya perusahaan yang ada (Nurfitriani, 2012, hal. 2). Apabila disandingkan dengan pernyataan dari Andi Mappi Sameng maka wisata alam merupakan jenis wisata yang cocok untuk dikembangkan di Kabupaten Karawang, dimana banyaknya pekerja pribumi maupun non-karawang akan melepas penat dengan melakukan kunjungan wisata

ditempat yang asri. Adapun salahsatu wisata alam yang ada di Kabupaten Karawang ialah Wisata alam Green Canyon yang berlokasi di Kampung Tonjong Roke, Desa Medal Sari, Kecamatan Loji Kabupaten Karawang Jawa Barat.

Gambar 1. Wisata Alam Green Canyon Karawang

Wisata alam Green Canyon sering dikunjungi wisatawan lokal maupun kancah nasional karena memiliki keindahan alam seperti adanya air terjun setinggi 5 meter dengan pemandangan alam serta air yang jernih, selain itu Green Canyon juga memiliki tebing hijau dengan panjang kurang lebih mencapai 100 meter sehingga banyak wisatawan yang rela melakukan kunjungan wisata ke Green Canyon hanya untuk melakukan suaka foto. Meskipun termasuk kedalam wisata alam, letak Green Canyon sangat dekat dengan pusat perkotaan (Adveture Indonesia, 2022).

Meskipun sering mendapatkan kunjungan wisatawan, Wisata Alam Green Canyon sendiri masih perlu pengembangan. Hal ini dikarenakan masih adanya beberapa masalah yang terjadi di Wisata Alam Green Canyon yang dapat membahayakan keselamatan para wisatawan, seperti yang terjadi pada awal bulan November tahun 2021 dimana terdapat video viral yang menunjukan terjadinya banjir bandang diarea wisata alam Green Canyon akibat penyempitan sungai Ciomas yang berada diperbatasan Kabupaten Karawang dan Bogor yang berakbat pada kerusakan prasarana (Pelita Karawang, 2021).

Permasalahan lain yang terjadi di Wisata Alam Grand Canyon adalah penataan ruang yang tidak rapi dan sampah yang berserakan akibat tidak adanya tempat pembuangan sampah yang baik dimana sampah hanya dikumpulkan melalui karung untuk kemudian baru diproses saat tim pengelola sampah datang. Dengan kapasitas jumlah pengunjung yang mencapai 1000 orang perharinya maka berpotensi menimbulkan timbunan sampah dinilai dapat merusak estetika keasrian dari Wisata Alam Green Canyon (Suryadi, 2021).

Wisata alam Green Canyon Karawang baru kembali dibuka pada akhir tahun 2021 setelah mengalami penutupan karena adanya pembatasan sosial di sektor pariwisata, sehingga banyak aktivitas pengembangan industri pariwisata Green Canyon yang harus dimulai dari awal lagi terutama yang berkaitan dengan promosi kepada kalangan luas diluar wilayah sekitar Kabupaten Karawang (Suryadi, 2021). Atas permasalah tersebut maka wisata alam Green Canyon Karawang dinilai masih perlu untuk dilakukan pengembangan.

Pengembangan pariwisata bukan hanya kewajiban bagi aparatur pemerintah melainkan juga masyarakat maupun swasta, dimana berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa pariwisata merupakan macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas layanan yang disediakan dan dikembangkan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah baik pusat atau daerah. Atas pertimbangan hal tersebut, maka diperlukan kolaborasi yang baik antar ketiga stakeholder guna membangun optimalisasi dalam pengembangan pariwisata Green Canyon. Istilah kolaborasi antara pihak pemerintah, masyarakat dan swasta dalam kajian ilmu pemerintahan sering disebut dengan *Collaborative Governance*.

Collaborative governance yang baik menurut Ansell dan Gash dalam (Islamy, 2018, hal. 52) merupakan proses kegiatan kolaborasi dengan mengatur suatu keputusan dalam proses kebijakan yang

dilakukan oleh beberapa lembaga publik dengan pihak lain yang terkait dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah, melalui empat tahapan proses yang meliputi kondisi awal, pola desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi.

Sejauh ini proses kolaborasi yang dijalankan masih belum terakomodir dengan baik, dimana penulis belum melihat adanya komando dari pihak pemerintah daerah Karawang atau lebih spesifik Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terhadap masyarakat maupun swasta untuk melakukan pengembangan wisata alam Green Canyon. Ketidakselarasan ini dapat dilihat dari implementasi pengembangan wisata yang berjalan sendiri-sendiri, dimana pemerintah masih sibuk dengan mempromosikan wisata Alam Green Canyon kepada masyarakat karawang dan luar Karawang melalui akun resmi website Disbudpar Karawang, sedangkan masyarakat lebih cenderung memberikan pengembangan wisata yang sifatnya spontanitas seperti gotong royong dalam membersihkan tempat wisata juga menjadi pemberi arah kepada para wisatawan yang tidak mengetahui lokasi Green Canyon. Selanjutnya peran swasta dalam pengembangan wisata alam Green Canyon belum terlihat secara signifikan baik bantuan secara finansial maupun prasarana.

Wisata alam Green Canyon yang pada tahun 2021 menerima penghargaan Sapta Pesona Asoka Award oleh Bupati dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang secara harapan mampu menjadi pusat perhatian bagi para stakeholders untuk melakukan pengembangan wisata justru kenyataannya masih mengalami GAP yang cukup jauh, dimana permasalahan seperti banjir, tidak adanya rambu atau penunjuk jalan ke Green Canyon sampai tidak adanya tempat pembuangan sampah.

Kajian mengenai *Collaborative Governanc*e dalam rangka mengembangkan industrri pariwisata daerah merupakan bagian dari ruang lingkup kajian ilmu pemerintahan, karena menurut Chema dalam (Keban, 2009, hal. 58) *governance* tempat muasal kajian *network, collaborative dan good/b*ad merupakan suatu sistem nilai, kebijakan, dan kelembagaan dimana urusan-urusan ekonomi, sosial, politik dikelola melalui interaksi masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Berangkat dari uraian diatas, maka penulis mempunyai ketertarikan untuk mengangkat permasalahan ini sebagai usulan penelitian yang berjudul *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Wisata Alam Green Canyon Di Desa Medalsari Kecamatan Pangkalan Kabupaten Karawang

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Ansell dan Gash dalam (Islamy, 2018) *collaborative governance* ialah proses kegiatan kolaborasi dengan mengatur suatu keputusan dalam proses kebijakan yang dilakukan oleh beberapa lembaga publik dengan pihak lain yang terkait dan terlibat secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah publik. Guna mendapatkan tujuan yang maksimal dalam melaksanakan *Colaborative Governance*, Ansell dan Gash memberikan model teori *Colaborative Governance* yang didalamnya terkandung empat unsur dimensi, meliputi kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif dan proses kolaborasi.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif yang menurut Sugiyono (2017) yakni sebuah sebuah metode yang digunakan oleh peneliti untuk penelitian yang dilakukan dalam kondisi alamiah dan didasari oleh filsafat *postpositivisme*. Dalam penelitian model ini peneliti adalah kunci yang akan menjabarkan hasil penelitian kedalam narasi atau gambar-gambar

Teknik pengambilan data dilalui melalui model tringulasi yang merupakan

gabungan dari wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Adapun wawancara yang digunakan adalah tidak berstruktur sehingga tidak berpaku pada pedoman wawancara yang ditujukan kepada elemen-elemen terkait, observasi dilakukan di wilayah kabupaten Karawang dengan model *Non-Participant*. Sementara studi dokumentasi diproleh melalui dua cara yakni teknik *offline* seperti buku dan *online* seperti *website*.

Setelah dilakukan pengambilan data, kemudian peneliti melakukan analisis terhadap data yang didapatkan sesuai dengan Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2017) yang diproses melalui tiga tahapan yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi awal

Pada tahap kondisi awal dalam relasi antar stakeholder, masing-masing aktor memiliki latar belakang yang berebeda, namun permasalahan yang sedang dhadapi memiliki kesamaan yang dapat menghasilkan sebuah bentuk hubungan asimetris dalam relasi yang dijalankan guna menyelesaikan permasalahan tersebut

Kondisi awal dalam suatu kolaborasi dipengaruhi oleh beberapa fenomena, yaitu para stakeholders memiliki kepentingan dan visi bersama yang ingin dicapai, ketidakseimbangan kekuatan, sumber daya, dan adanya kecemasan publik.

Adapun kondisi awal yang menjadi latar belakang terjadinya kolaborasi pemerintahan pada wisata alam Green Canyon adalah kesamaan tujuan untuk menjadikan objek wisata tersebut menjadi lebih layak baik dari segi kenyamananan maupun keselamatan sehigga mampu meningkatkan kuantitas kunjungan wisata ke Green Canyon.

Belum terdapatnya jumlah bak sampah yang memadai menjadi salahsatu alasan kuat banyaknya pengunjung yang meraa tidak nyaman apabla verkunjung ke Green Canyon. Tidak hanya permasalahan estetika saja yang menimpa Green Canyon melainkan juga pada bulan April 2021 telah terjadi setidaknya satu kasus yang membuat pengunjung kehilangan nyawa.

Kurang optimalnya sarana dan prasarana pada green canyon yang menjadi kecemasan bersama harus dioptimalkan, perbaikan sarana adalah tugas seluruh pihak tidak hanya pemerintah daerah Karawang melainkan juga swasta dan masyarakar disekita Loji, Karawang.

Desain Kelembagaan

Pemimpin meminta para pemangku kepentingan untuk terlibat dalam negoisasi itikat baik dan mengeksplorasi, kompromi dan perolehan bersama. *Collaborative governance* sebagai konsensus yang berorientasi meskipun menunjukkan bahwa konsensus tidak selalu tercapai. Masalahnya di sini apakah semua kolaboratif harus memerlukan konsensus. Masalah desain kelembagaan penggunaan tenggang waktu melemah merupakan sifat berkelanjutan kolaborasi secara tidak sengaja mengurangi insentif kerjasama jangka panjang.

Menurut model *collaborative governance* Ansell dan Gash dimensi desain kelembagaan dalam kolaborasi meliputi partisipasi, forum terbatas, aturan dasar sebagai pendukung kolaborasi dan transparansi.

Dalam pelaksanaan Collaborative Governance dalam mengoptimalkan pengeloaan tempat wisata green canyon dilandasi atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa pariwisata merupakan macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas layanan yang disediakan dan dikembangkan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah baik pusat atau daerah.

Meskipun terdapat peraturan yang mengharuskan kolaborasi antar stakeholder pemerintah, namun dalam pelaksanaanya belum ada kejelasan partisipasi dan forum terbatas antar stakeholder dimana masyarakat hanya berpartisipasi sebagai

pihak penggerak pasif seperti penunjuk arah bagi para wisatawan, sementara swasta lebih kearah penanaman modal sehingga perannnya tidak begitu terlihat juga pemerintah daerah yang baru sebatas promosi dan penanggaran fasilitas.

Dengan minimnya forum yang membersamai mereka (swasta, pemerintah dan masyarakat) maka transparansi baik yang meliputi rencana panjang maupun pendek sampai anggaran hanya diketahui oleh pihak pemerintah daerah Karawang.

Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan penting untuk merangkul, memberdayakan dan melibatkan para pemangku kepentingan dan memobilisasi untuk kesuksesan kolaborasi. Konflik yang tinggi dan kepercayaan rendah memiliki insentif untuk berpartisipasi maka *collaborative governance* dapat melanjutkan layanan perantara antara *stakeholder* yang menerima layanan.

Ketersediaan para pemimpin cenderung bergantung sesuai dengan keadaan setempat. Implikasi kemungkinan kerjasama yang efektif mungkin terhambat oleh kurangnya kepemimpinan. Kepemimpinan fasilitatif dalam kolaborasi pemerintahan meletakan mediator kolaborasi dan pelindung kolaborasi sebagai dimensi.

Dengan minimnya kolaborasi yang dilakukan maka terdapat minimnya peran sosok atau kelompok yang dapat dikatakan sentral untuk menjadi pelopor gerakan kolaborasi dalam pengelolaan tempat wisata alam green canyon di Loji Karawang.

Pihak yang paling bertanggungjawab sebagai pemumpin fasilitatif adalah pemeirintah lebih spesifik pada penelitian ini maka Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Karawang sejatinya dituntut untuk mampu menjadi jembatan yang dapat menjalin erat para stakeholder untuk bersatu.

Proses kolaborasi

Proses kolaboratif ini merupakan variable yang penting, dimana proses kolaboratif diawali dengan dialog tatap muka yang berkaitan dengan kepercayaan yang baik, setelah melakukan dialog tatap muka dengan baik maka akan terbangun suatu kepercayaan yang nantinya akan berpengaruh terhadap komitmen dalam proses kolaborasi, setelah komitmen para stakeholders tinggi akan terjadi suatu pemahaman bersama dalam perumusan masalah, identifikasi nilai-nilai, dan misi yang jelas. Setelah para stakeholders memiliki kesamaan dan kesepahaman, maka akan menentukan rencana strategis untuk menjalankan kolaborasi

Sejauh ini belum terdpat visi maupun misi yang jelas untuk diketahui dan dilaksakan oleh para stakeholders baik swasta maupun masyarakat dalam pengelolaan tempat wisata alam green canyon di Loji Kabupaten Karawang. Hal ini dibuktikan melalui belum taunya masyarakat karena tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak sentral atau Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Karawang mengenai pengelolaan green canyon secara bersama atau kolaborasi.

KESIMPULAN

1. Kondisi awal yang menjadi latar belakang terjadinya Collaborative Governance dalam pengelolaan wisata alam Green Canyon adalah minimnya fasulitas yang menunjang kenyamanan maupun keselamatan sementara pariwisata Green Canyon adalah salah satu andalan pariwisata di Kabupaten Karawang
2. Desain kelambagaan Collaborative Governance dalam mengoptimalkan pengeloaan tempat wisata green canyon dilandasi atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa pariwisata merupakan macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas layanan yang disediakan dan

dikembangkan oleh masyarakat, pengusaha dan pemerintah baik pusat atau daerah.

3. Kepemimpinan fasilitatif pada Collaborative Governance dalam mengoptimalkan pengeloaan tempat wisata green canyon tidak berjalan optimal karena ketidakjelasan partisipasi dan minimnya pengetahuan dari stakehoder terkait kolaborasi
4. Proses kolaborasi tidak berjalan seirama dengan yang diharapkan dimana swasta selaku pemodal tidak memberikan sesuai kebutuhan, masyarakat tidak tahu secara pasti gerakan kolaborasi dan tidak adanya ajakan yang pasti dari pihak pemerintah terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Adveture Indonesia. (2022, Maret 3). *Adventure>Wisata>alam*. Retrieved from Green Canyon Karawang, Wisata Alam Yang Ajib Banget:https://adventureindonesia.web.id/green-canyon-karawang-wisata-alam-yang-ajib-banget/

Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian.* Jakarta: Rhineka Cipta.

Bingham, B. (2010). The Next Generation of Administrative Law: Building The Legal Infrastructure for Collaborative Governance. *Wisconsin Law Review*, 297-356.

CEIC Data. (2021, Januari 3). *CIC Data>Tourism Revenue: Annual: Asia.* Retrieved from Indonesia Pendapatan Pariwisata: https://www.ceicdata.com/id/indicator/indonesia/tourismrevenue#:~:text=Pendapatan%20Pariwisata%20Indonesia%20dilaporkan%20sebesar,sampai%202020%2C%20dengan%2019%20observasi.

Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset.* Jakarta: Pustaka Pelajar.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2015). An Integrative Framework For Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 1-29.

Harefa, M. (2020). DAMPAK SEKTOR PARIWISATA TERHADAP PENERIMAAN DAERAH DI KABUPATEN BELITUNG. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 11, No. 1*, 65-77.

Islamy, L. O. (2018). *Collaborative Governance Konsep Dan Aplikasi.* Deepublish: Yogyakarta.

Junaidi. (2015). Collaborative Governance dalam Upaya Menyelesaikan Krisis Listrik di Kota Tanjungpinang. *Jurnal FISIP Umarah*.

Keban, Y. (2009). *Administrasi Publik.* Jakarta: Gava Media.

Lemos, M. C., & Agrawal, A. (2006). Environmental Governance. *Annual Review of Environment and Resources, Vol. 31 No 1*, 297–325.

Nurfitriani, A. (2012). *Pengaruh Industrialisasi di Kanupaten Karawang.* Depok: FIB UI.

Pelita Karawang. (2021, November 5). *Viral, Wisata Green Canyon Karawang di Terjang Banjir Bandang*. Retrieved from Pelita Karawang>News>Info Wisata: https://www.pelitakarawang.com/2021/11/viral-wisata-green-canyon-karawang-di.html

Rusiawan, W. (2021). *Outlook Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia 2020/2021*. Jakarta: Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Sabon, V. L. (2018). Strategi Peningkatan Kinerja Sektor Pariwisata Indonesia pada Asean Economic Community. *Jurnal Bisnis dan Manajemen, (8) (2)*, 163-176.

Sameng, A. M. (2013). *Cakrawala Pariwisata.* Jakarta: Balai Pustaka.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sukandarrumidi. (2012). *Metodologi Penelitian.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Suryadi, M. (2021, Oktober 21). *Media Seruni*. Retrieved from Lama Tidak Buka Akibat Pandemi, Green Canyon Karawang Kembali Buka: https://mediaseruni.co.id/lama-tidak-buka-akibat-pandemi-green-canyon-karawang-kembali-buka/